

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

PENDAPATAN ASLI DAERAH DI INDONESIA TAHUN 2010-2017

Indah Putri Perwirasari

indahputriperwirasari@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of Regional Gross Domestic Product (RGDP), General Allocation Fund (GAF), Special Allocation Fund (SAF), and Investment towards Own Source Revenue in Indonesia period 2010-2017. This research use quantitative analysis with secondary data in the form of panel data taken from 33 province in Indonesia. The analysis method used in this research is Fixed Effect Model (FEM), with Robust Standard Error. The result of this research showed that RGDP, SAF, and Investment have a positive and significant impact towards Own Source Revenue. Whereas for GAF has a positive impact, however it doesn't have a significant impact toward Own Source Revenue in Indonesia period 2010-2017.

Keywords : *Own Source Revenue, Regional Gross Domestic Product (RGDP), General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Investment, Panel Data.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Suatu negara memiliki tujuan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah satu ukuran untuk mengukur pendapatan nasional. Dari pendapatan nasional dalam suatu negara yakni dapat menunjukkan seberapa besar aktivitas perekonomian secara keseluruhan di negara tersebut. Konsep dari pendapatan nasional adalah suatu ukuran yang sering dipakai untuk menunjukkan satu-satunya indikator dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah proses, bukan hanya berupa suatu gambaran ekonomi pada suatu periode tertentu, memiliki perkembangan atau perubahan dan penggunaan waktu (Boediono, 1999).

Pemerintah pusat membuat suatu kebijakan dimana pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk dapat mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan desentralisasi. Hal ini dilakukan dengan harapan kedepannya daerah akan memiliki kemampuan untuk dapat membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai dengan daerah otonomi yang nyata. Pengertian otonomi daerah menurut “undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, definsisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Penerapan otonomi daerah memiliki konsekuensi yakni dari setiap daerah lebih ditekankan untuk dapat meningkatkan PAD agar dapat membiayai urusan dari rumah tangganya sendiri. Upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik ini dapat menunjukkan terciptanya tata pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). Dalam upaya peningkatan tersebut dilakukan dengan cara terus menggali sumber-sumber baru, pendapatan baru, dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi sumber daya dan sarana. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebenarnya merupakan eksekusi dari pertumbuhan ekonomi (Saragih, 2003).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan “Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, dalam pasal 1 ayat 18 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. “Sumber pendapatan yang diterima daerah menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang sah”. Berikut ini data Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 33 provinsi di Indonesia tahun 2015-2017.

Tabel 1.1

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 33 Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2017

Provinsi	Pendapatan Asli Daerah		
	2015	2016	2017
ACEH	11.694.163	12.364.564	14.291.939
SUMATERA UTARA	8.480.759	10.440.619	12.170.582
SUMATERA BARAT	4.052.249	4.624.657	6.110.997
RIAU	6.911.045	6.942.927	8.859.018
JAMBI	3.129.719	3.203.974	4.163.725
SUMATERA SELATAN	5.990.424	6.582.781	8.587.020
BENGKULU	2.180.679	2.355.564	3.041.325
LAMPUNG	4.787.308	5.588.723	6.723.785
KEP. BABEL	1.886.999	1.949.866	2.355.579
KEP. RIAU	2.513.438	2.852.614	3.201.559
DKI JAKARTA	44.209.238	53.784.706	62.466.130
JAWA BARAT	24.009.981	27.694.035	30.540.901
JAWA TENGAH	16.828.154	19.632.577	23.467.518
DI YOGYAKARTA	3.400.015	3.899.193	4.988.379
JAWA TIMUR	22.228.450	24.962.122	27.932.994
BANTEN	7.328.221	8.656.395	9.790.923
BALI	4.967.967	5.249.018	6.222.704
NTB	3.448.586	3.949.997	4.791.395
NTT	3.315.669	3.875.554	4.722.737
KALIMANTAN BARAT	4.073.147	4.494.429	5.095.395
KALIMANTAN TENGAH	3.252.748	3.548.505	4.086.898
KALIMANTAN SELATAN	4.746.943	5.218.111	5.703.186
KALIMANTAN TIMUR	9.376.313	7.985.728	8.098.900
SULAWESI UTARA	2.527.959	2.885.186	3.556.373
SULAWESI TENGAH	2.901.588	3.175.693	3.579.386
SULAWESI SELATAN	6.105.815	7.162.589	8.901.929
SULAWESI TENGGARA	2.471.389	2.809.721	3.545.198
GORONTALO	1.389.324	1.584.308	1.831.693
SULAWESI BARAT	1.473.750	1.688.607	1.813.837
MALUKU	2.132.589	2.744.943	2.860.027
MALUKU UTARA	1.801.248	2.022.258	2.864.176
PAPUA BARAT	5.840.353	6.740.387	6.888.868
PAPUA	11.805.767	12.567.840	13.968.877

Sumber: BPS, tahun 2015-2017, diolah

Berdasarkan tabel 1.1 di atas diketahui bahwa Provinsi DKI Jakarta memiliki nilai PAD paling tinggi di bandingkan dengan provinsi lainnya. Provinsi DKI Jakarta menunjukkan nilai PAD pada tahun 2015 sebesar 44.209.238, tahun 2016 sebesar 53.784.706, dan tahun 2017 sebesar 62.466.130.

Sementara, nilai PAD yang paling rendah adalah provinsi Gorontalo. Nilai PAD provinsi Gorontalo pada tahun 2015 sebesar 1.389.324, tahun 2016 sebesar 1.584.308, dan tahun 2017 sebesar 1.831.693. Berdasarkan dengan fenomena yang terjadi tersebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi penting untuk di bahas dalam makro ekonomi, khususnya dalam analisis perekonomian suatu wilayah. PDRB merupakan salah satu alat ukur yakni data PDRB dapat memberikan gambaran-gambaran keadaan ekonomi dalam satu wilayah, baik di masa lalu maupun sekarang yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan, evaluasi dan target yang akan dicapai pada masa berikutnya. Sukirno (2003) berpendapat bahwa besaran PDRB setiap daerah bervariasi sesuai dengan potensi yang dimiliki dan faktor produksi dari masing-masing daerah.

Faktor lain dalam mengukur gambaran keadaan ekonomi yaitu investasi juga dianggap penting untuk menjadi penggerak roda pembangunan di bidang ekonomi. Investasi merupakan strategi yang tepat bagi negara-negara berkembang, dengan adanya investasi proses pembangunan ekonomi di negara berkembang akan menjadi lebih cepat. Menurut Sariningrum (2010) investasi atau penanaman modal adalah motor penggerak suatu perekonomian, dengan banyaknya investasi yang direalisasikan di suatu negara maka dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, sedangkan sedikitnya investasi akan menunjukkan lambannya laju pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan fenomena tersebut pendapatan asli daerah menjadi penting untuk di bahas, karena pembangunan ekonomi suatu negara tidak hanya di lihat dari pendapatan nasional, akan tetapi juga dapat dilihat dari pendapatan asli daerah dalam makro ekonomi khususnya dalam analisis perekonomian suatu wilayah. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti seberapa besar pengaruh atau keterkaitan pendapatan asli daerah dan pembangunan ekonomi.

Batasan Masalah

Penelitian ini akan membahas pendapatan asli daerah tiap provinsi di Indonesia dari tahun 2010 sampai tahun 2017. Mengingat Provinsi Kalimantan Utara merupakan daerah pemekaran baru yang

dimekarkan tahun 2012, sehingga terdapat banyak keterbatasan data. Maka dari itu penulis tidak menyertakan Provinsi Kalimantan Utara dalam penelitian ini.

Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan di latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah di 33 provinsi?
2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah di 33 provinsi?
3. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pendapatan Asli Daerah di 33 provinsi?
4. Bagaimana pengaruh Investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah di 33 provinsi?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisa seberapa besar pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah di 33 provinsi
2. Menganalisa seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah di 33 provinsi
3. Menganalisa seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pendapatan Asli Daerah di 33 provinsi
4. Menganalisa seberapa besar pengaruh Investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah di 33 provinsi

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah, dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang diambil didasari dari peraturan daerah yang sesuai dengan Perundang-undangan (Siahaan, 2005). Pendapatan Asli Daerah menjadi sumber penerimaan daerah yang harus terus

ditingkatkan untuk dapat menanggung sebagian dari belanja yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk melakukan penyelenggaraan kegiatan pembangunan yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, sehingga dapat menciptakan kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan serta bertanggung jawab bisa terlaksanakan (Darise, 2006).

Menurut “Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan peraturan Undang-Undang (UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1, ayat 18) “sumber pendapatan asli daerah diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Sumber-sumber penerimaan PAD harus terus dicari untuk dapat digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan untuk mengembangkan otonomi daerah”.

Pendapatan Asli Daerah bertujuan guna memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah sesuai potensi sebagai perwujudan desentralisasi. Menurut Mardiasmo (2002) PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil BUMD, hasil pengelolaan kekayaan dan aset daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dana Alokasi Umum

Menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan atau Dana Alokasi Umum, yang menyatakan bahwa:

“Dana Alokasi Umum (DAU) ialah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan memiliki tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk dapat membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.”

Dalam mewujudkannya, DAU dialokasikan kepada setiap daerah dalam rangka menjalankan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. DAU yang merupakan transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bersifat (*block grant*), yang berarti pemerintah daerah diberi keleluasaan dalam penggunaannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah dengan bertujuan untuk dapat menyeimbangkan kemampuan keuangan antar daerah.

Dana Alokasi Khusus

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk dapat membantu membiayai kebutuhan tertentu. Dana Alokasi Khusus dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Daerah tertentu yang dimaksud yakni adalah daerah-daerah.

Investasi

Investasi adalah sebuah langkah awal kegiatan dalam melakukan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal sangat mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi. Berkaitan dengan upaya menumbuhkan perekonomian setiap negara akan berusaha untuk menciptakan iklim yang dapat meningkatkan investasi. Sasaran yang dapat ditunjukkan tidak hanya pada masyarakat atau kalangan swasta dalam negeri, melainkan juga luar negeri (Dumairy, 1996).

Produk Domestik Regional Bruto dan Pendapatan Asli Daerah

PDRB merupakan tolak ukur pendapatan masyarakat dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula seseorang mengeluarkan pendapatannya untuk membayar pajak (*ability pay*) yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada tingkat distribusi pendapatan tertentu yang tetap, dengan semakin tingginya PDRB perkapita riil suatu daerah, maka akan semakin besar kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan pemerintah (Atmaja, 2007).

Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah

Dana alokasi daerah dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah agar dapat mendanai kebutuhan daerah. DAU dialokasikan untuk provinsi/kabupaten/kota. Semakin tinggi DAU yang diterima oleh daerah, maka semakin tinggi nilai dari PDRB daerah tersebut. Hal ini disebabkan karena peran DAU yang diterima pemerintah daerah akan ditunjukkan untuk belanja pemerintah daerah khususnya untuk belanja modal. DAU sendiri memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan dan

pertumbuhan ekonomi regional di daerah tersebut. Ketika pengelolaan DAU dilakukan dengan benar maka dana tersebut akan menjadikan program kerja yang telah dirancang oleh pemerintah daerah yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik atau infrastruktur berjalan dengan baik, dengan terlaksana program kerja pemerintah daerah maka akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah

Salah satu hubungan keuangan pusat dan daerah adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), yakni dana bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan/ditransfer kepada daerah untuk dapat membiayai kegiatan khusus yang merupakan tanggung jawab daerah dan merupakan prioritas nasional, sehingga untuk dapat membantu mengurangi beban dari biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Oleh sebab itu pelaksanaan DAK sendiri diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang. Dalam perhitungan DAK perdaerah harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis yang ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan, sehingga dengan pengelolaan DAK secara bijak dan benar oleh pemerintah daerah maka DAK akan membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Investasi dan Pendapatan Asli Daerah

Pada dasarnya investasi adalah suatu kegiatan awal dalam membentuk pembangunan ekonomi suatu negara. Investasi bisa dilaksanakan dengan berbagai pihak yakni baik pihak swasta ataupun pemerintah. Investasi merupakan cara yang dapat dilakukan agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomidan standar hidup masyarakat dalam jangka panjang (Mankiw, 2003).

Harrod-Dhomar melihat pengaruh yang besar dari investasi dalam perspektif waktu yang lebih panjang. Menurutnya, pengeluaran investasi (I) tidak hanya memiliki pengaruh terhadap permintaan agregat (Z) saja, tetapi juga terhadap penawaran agregat (S) melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Dalam perspektif waktu jangka panjang, investasi menambah stok kapital (misalnya pabrik, jalan, dan sebagainya). Jadi $I = \Delta K$, dimana K adalah stok modal kapital dalam masyarakat. Ini berarti dengan terjadinya peningkatan kapasitas produksi masyarakat yang akan menghasilkan output yang potensial, yang bisa dihasilkan melalui stok kapital atau kapasitas pabrik yang ada (Boediono, 1992).

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu data panel dan tergolong dalam jenis data kuantitatif. Data panel yang dimaksudkan yaitu berupa gabungan dari data runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*). Data panel yang digunakan pada penelitian ini berbentuk data tahunan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia.

Metode Analisis Data

Metode analisis menggunakan data panel, sedangkan analisis data menggunakan aplikasi Stata 13. Data panel yang digunakan merupakan gabungan data *time series* dan data *cross section* yang terdiri dari semua provinsi di Indonesia, kecuali Provinsi Kalimantan Utara dikarenakan provinsi tersebut merupakan provinsi pemekaran baru sehingga terdapat banyak kekosongan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui penyimpangan asumsi klasik yang terjadi dari hasil penelitian (Basuki & Yuliadi, 2015).

Uji Heteroskedastisitas

Asumsi kritis pada *classical linear regression model* (CLRM) adalah faktor gangguan yang memiliki varian yang sama. Apabila asumsi tersebut tidak terpenuhi maka masalah heteroskedastisitas akan muncul (Gujarati dan Porter, 2012).

Tabel 4. 1

Hasil Uji Heteroskedastisitas (*Breusch Pagan/Cooke-Weisberg Test*)

<i>Chi-Sq. Statistic</i>	<i>Probabilitas</i>
6.04	0.0140

Sumber: Lampiran, data diolah

Tabel 4.1 diatas menunjukkan output hasil uji heteroskedastisitas. Dapat dilihat dari tabel, bahwa terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam penelitian ini. Masalah terjadi disebabkan karena terdapat varians yang tidak konstan. Untuk dapat melakukan koreksi terhadap permasalahan heteroskedastisitas ini, dapat dilakukan dengan menggunakan regresi model *Robust Standard Error*, yang akan dijelaskan lebih lanjut pada sub bab berikutnya.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas adalah keadaan yang dimana terdapat hubungan antar variabel-variabel penjelas dalam persamaan regresi. Uji multikolinearitas yang bertujuan untuk dapat menguji apakah dalam regresi ini ditemukan adanya korelasi. Apabila terjadi multikolinearitas, maka koefisien regresi dari variabel bebas tidak signifikan dan mempunyai *standard error* yang tinggi. Dimana semakin kecil korelasi antar variabel bebas, maka model regresi akan semakin baik (Basuki dan Yuliadi, 2015).

Tabel 4. 2
Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF	1/VIF
LogDAK	1.97	0.508622
LogDAK	1.48	0.675682
LogPDRB	1.31	0.763137
LogDAU	1.26	0.795916
Mean VIF	1.50	

Sumber: Lampiran, Data diolah

Dari tabel 4.2 diatas, menunjukkan bahwa tidak ada indikasi multikolinearitas yang dimana Mean VIF < 8, sehingga dapat dinyatakan bahwa dalam uji multikolinearitas tidak ada masalah.

Hasil Regresi Data Panel

Berdasarkan uji spesifikasi model yang telah dilakukan serta dari perbandingan nilai terbaik maka model regresi yang digunakan adalah *Fixed Effect Model*. Akan tetapi dikarenakan adanya permasalahan heteroskedastisitas, maka penulis melakukan koreksi heteroskedastisitas dengan menggunakan *Robust Standard Error*, atau dikenal juga dengan heteroskedasticity *robust standard error*, *robust standard error* ini diperkenalkan oleh seorang ahli ekonometrika White (1980). Pada dasarnya prosedur koreksi heteroskedastisitas ada dua, yakni koreksi terhadap standar error regresi dan *Generalized Least Square* (GLS). *Robust standard error* ini merupakan tipe koreksi yang pertama, dan dilakukan hanya terbatas pada standar error regresi. Namun, tidak ada modifikasi ataupun estimasi ulang atas parameter yang diperoleh dari OLS (Wooldridge, 2003)

Dalam estimator standar error milik White dapat membantu untuk menghindari kesalahan dalam perhitungan interval estimasi atau kesalahan nilai untuk uji statistik dengan adanya permasalahan dari heteroskedastisitas. Dijelaskan dengan adanya heteroskedastisitas, bahwa model dalam regresi yang digunakan sudah bukan menjadi yang terbaik. Apabila dalam regresi memiliki ukuran sampel yang besar, maka varian dari model regresi masih cukup kecil untuk mendapatkan estimasi yang tepat. *Robust standard error* dapat digunakan selain untuk bisa mengatasi kemungkinan dapat terjadinya heteroskedastisitas disaat menggunakan model regresi, namun juga dapat digunakan untuk dapat mengatasi terhadap kemungkinan

kesalahan dalam spesifikasi dari fungsi varian saat menggunakan *Generalized Least Square* (GLS) (Hill, Griffiths, dan Lim, 2010). Berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan hasil estimasi data menggunakan *robust standard error* dengan jumlah observasi 33 provinsi di Indonesia periode 2010-2017.

Tabel 4. 6

Fixed Effect Model dengan Robust Standard Error

Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah	Koefisien	Robust Standard Error	Probabilitas
LogPDRB	0.0484516	0.0196157	0.019
LogDAU	0.1317145	0.0762456	0.094
LogDAK	0.0916198	0.0191578	0.000
LogInvestasi	0.1480814	0.0268379	0.000
Konstanta	16.93636	2.348978	0.000

Sumber: Lampiran, data diolah

Dari tabel 4.6 di atas, dapat dibentuk model analisis data panel terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di setiap provinsi di Indonesia yang diinterpretasikan sebagai berikut:

$$PAD_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{LogPDRB}_{it} + \beta_2 \text{LogDAU}_{it} + \beta_3 \text{LogDAK}_{it} + \beta_4 \text{LogINV}_{it} \text{ et}$$

Dimana :

PAD = Pendapatan Asli Daerah

LogPDRB = Produk Domestik Regional Bruto

LogDAU = Dana Alokasi Umum

LogDAK = Dana Alokasi Khusus

LogINV = Investasi

β_0 = Konstanta

$\beta_1 - \beta_4$ = Koefisien Parameter

i = *Cross Section*

t = *Time Series*

et = *Disturbance Error*

Hasil yang diperoleh dari regresi adalah sebagai berikut;

$$PAD_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{LogPDRB}_{it} + \beta_2 \text{LogDAU}_{it} + \beta_3 \text{LogDAK}_{it} + \beta_4 \text{LogINV}_{it} \text{ et}$$

$$PAD_{it} = 16.93636 + 0.0484516 * \text{LogPDRB}_{it} + 0.1317145 * \text{LogDAU}_{it} + 0.0916198 * \text{LogDAK}_{it} + 0.1480814 * \text{LogINV}_{it} \text{ et}$$

Keterangan:

β_0 = Nilai 16.93636 dapat diartikan bahwa apabila semua variabel independen (PDRB, DAU, DAK, dan Investasi) dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan maka Pendapatan Asli Daerah sebesar 16.93636%.

β_1 = Nilai 0.0484516 dapat diartikan bahwa apabila ketika Produk Domestik Regional Bruto naik sebesar 1% maka Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar 0.0484516% dengan asumsi PAD tetap.

β_2 = Nilai 0.1317145 dapat diartikan bahwa apabila ketika Dana Alokasi Umum naik sebesar 1% maka Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar 0.1317145% dengan asumsi PAD tetap.

β_3 = Nilai 0.0916198 dapat diartikan bahwa apabila ketika Dana Alokasi Khusus naik sebesar 1% maka Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar 0.0916198% dengan asumsi PAD tetap.

β_4 = Nilai 0.1480814 dapat diartikan bahwa apabila ketika Investasi naik sebesar 1% maka Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar 0.1480814% dengan asumsi PAD tetap.

Uji Statistik

Uji statistik adalah uji yang digunakan dalam menguji kebenaran atau kesalahan pada sampel. Dalam uji statistik penelitian ini meliputi determinasi (R^2), uji signifikansi bersama-sama (Uji Statistik F) dan Uji signifikansi parameter individual (Uji Statistik t).

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi didefinisikan sebagai proporsi atau persentase dari total variasi variabel dependen Y yang dijelaskan oleh garis regresi (variabel independen X). Koefisien determinasi memiliki fungsi untuk dapat mengukur kemampuan model dalam menerangkan himpunan dari variabel dependen. Nilai dari koefisien determinasi ini terletak antara nol sampai satu. Dengan semakin angkanya mendekati satu maka ini merupakan semakin baik garis regresi karena mampu menjelaskan data aktualnya, namun apabila mendekati dengan angka nol maka mempunyai garis regresi yang kurang baik (Widarjono, 2013).

Hasil dari regresi menggunakan *Fixed Effect Model*, dengan *Robust Standard Error*, dengan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.4875. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik 48.75% total variasi dalam Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh variabel bebas dalam penelitian, yaitu Produk Domestik Regional Bruto, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, dan Investasi. Sedangkan sisanya 51.25% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian.

Uji Signifikansi Variabel Secara Serempak (Uji F)

Uji F ini digunakan untuk dapat mengetahui seberapa pengaruh dari semua variabel independen secara keseluruhan dalam mempengaruhi variabel dependen (Widarjono, 2013). Dalam mengambil keputusan di dalam uji F ini adalah dengan membandingkan probabilitas variabel independen secara keseluruhan antar variabel independen terhadap dependen dengan alpha atau derajat kepercayaan yang dipakai oleh penulis adalah sebesar 0.05. Hasil estimasi *standard error* yang diperoleh nilai probabilitas F-statistik adalah sebesar 0.0000, signifikan pada $\alpha 5\%$. Artinya, secara keseluruhan variabel independen Produk Domestik Regional Bruto, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Investasi berpengaruh terhadap variabel dependen Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Indonesia.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji t bertujuan guna melihat seberapa jauh pengaruh individual dari masing-masing variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji ini digunakan untuk menguji kemaknaan parsial, dengan menggunakan uji t, namun apabila nilai probabilitas $< \alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak, dengan demikian variabel bebas dapat menerangkan variabel terikat yang ada didalam model. Sebaliknya apabila nilai probabilitas $> \alpha = 5\%$ maka $H_0 =$ tidak dapat ditolak, dengan demikian variabel bebas tidak dapat menjelaskan variabel terikatnya atau dengan kata lain tidak ada pengaruh antara dua variabel yang diuji.

Tabel 4. 7

Uji t-Statistik

Variabel Dependen: Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Koefisien	Robust Standard Error	t-Statistic	Prob.
LogPDRB	0.0484516	0.0196157	2.47	0.019
LogDAU	0.1317145	0.0762456	1.73	0.094
LogDAK	0.0916198	0.0191578	4.78	0.000
LogInvestasi	0.1480814	0.0268379	5.52	0.000

Sumber: Lampiran, data diolah

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, dapat di lihat bahwa t-statistik untuk variabel PDRB sebesar 2.47 dengan probabilitas 0.019 signifikan pada $\alpha 5\%$. Jadi dapat diketahui bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di setiap provinsi di Indonesia. Variabel dana alokasi umum memiliki t-statistik sebesar 1.73 dengan probabilitas 0.094 tidak signifikan pada $\alpha 5\%$. Jadi dapat diketahui bahwa DAU berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PAD di setiap provinsi di Indonesia. Variabel DAK memiliki t-statistik sebesar 4.78 dengan probabilitas 0.000 signifikan pada $\alpha 5\%$. Jadi dapat diketahui bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di setiap provinsi di Indonesia. Variabel investasi memiliki t-statistik 5.52 dengan probabilitas 0.000 signifikan pada $\alpha 5\%$. Jadi dapat diketahui bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di setiap provinsi di Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari produk domestik regional bruto, DAU, DAK, dan investasi terhadap pendapatan asli daerah di setiap provinsi di Indonesia yang terjadi selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2017, maka dengan ini penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Produk domestik regional bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di setiap provinsi di Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2017. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan apabila PDRB meningkat maka akan meningkatkan PAD.
2. Dana alokasi umum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah di setiap provinsi di Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2017. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan yang dimana apabila pendapatan asli daerah meningkat maka akan meningkatkan PAD, akan tetapi dalam penelitian ini dana alokasi umum tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD.
3. Dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di setiap provinsi di Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2017. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan yang dimana apabila dana alokasi khusus meningkat maka akan meningkatkan PAD.
4. Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di setiap provinsi di Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2017. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan yang dimana apabila investasi meningkat maka akan meningkatkan PAD.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran yang berhubungan dengan hasil dari penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dan masukan agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang terkait.

1. Bagi pemerintah, dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah daerah di setiap provinsi di Indonesia, maka penelitian memberikan saran sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah diharapkan agar lebih fokus lagi untuk mengembangkan potensi sumber daya dan sektor-sektor ekonomi daerah untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah supaya lebih mandiri finansial dalam mengelola aset daerahnya dalam guna untuk melaksanakan otonomi daerah.
 - b. Pemerintah daerah memanfaatkan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus dengan bijak dan benar untuk meningkatkan infrastruktur, sarana dan prasarana publik, dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan produktivitas publik di daerah.
2. Bagi peneliti selanjutnya, guna pengembangan ilmu pengetahuan sebaiknya peneliti selanjutnya dapat lebih banyak lagi melakukan penelitian mengenai pendapatan asli daerah dengan PAD sebagai variabel dependen. Seperti yang sudah diterangkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan variabel yang tepat untuk mengukur pertumbuhan pendapatan asli daerah, disarankan untuk peneliti selanjutnya untuk memperpanjang jumlah *time series*, sehingga dapat melihat keadaan fluktuasi pertumbuhan pendapatan asli daerah. Selain itu, sebaiknya peneliti selanjutnya menggunakan variabel lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi seperti (belanja daerah, dana bagi hasil, dan lainnya) agar dapat menjadi pertimbangan pemerintah untuk menetapkan kebijakan fiskal dan mengetaskan permasalahan ekonomi di daerah, terutama di daerah tertinggal. Sehingga dengan begitu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan akan merata sehingga dapat menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan merata.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya mencakup 4 variabel yang dipakai sebagai indikator yang mempengaruhi pendapatan asli daerah, yaitu produk domestik regional bruto, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan investasi. Selain itu, objek penelitian ini hanya menggunakan 33 provinsi di Indonesia, yang dikarenakan satu provinsi yaitu Kalimantan Utara merupakan daerah pemekaran yang baru diresmikan pada tahun 2012, sehingga terdapat kekosongan data pada tahun sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, K., & Djoko, M. (2016, May). The Effect of Financial Balance Transfer an Regional Own-Source Revenue on Regional Expenditure of Regencies an Municipalities in East Java Province. *Internasional Journal of Scientific an Research Publications*, 6(5), 28-30 ISSN .
- Adelina, R. (2013). Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik. *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 11-19.
- Arsyad, L. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE.
- Arsyad, L. (2010). *Pengantar Perencanaan dan PEmbangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2012). *Statistik Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2013). *Statistik Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Statistik Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Statistik Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Statistik Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Statistik Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Statistik Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Basuki, A. T., & Yuliadi, I. (2015). *Ekonometrika: Teori & Aplikasi*. Yogyakarta: Penerbit Mitra Pustaka Nurani (MATAN).
- Batik, K. (2013). Analisis Pengaruh Investasi, PDRB, Jumlah Penduduk, Penerimaan Pembangunan, dan Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(1), 135-139.
- Boediono. (1985). *Ekonomi dalam Transisi*. Yogyakarta: BPFE.
- Effendi, N., & Setiawan, M. (2013). *Ekonometrika: Pendekatan Teori dan Terapan*. Jakarta: Salemba Empat.

- Ghozali, I. (2014). *Ekonometrika: Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan IBM SPSS 22*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2012). *Dasar- dasar Ekonometrika Edisi 5 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2012). *Dasar- dasar Ekonometrika Edisi 5 Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jin, J., & Zou, H.-f. (2005). Fiscal Decentralization Revenue and Expenditure Assignments, and Growth in China. *Journal of Asian Economics*, 16.
- Kuncoro, M. (1997). *Ekonomi PEmbangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan Edisi ketiga*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kuncoro, M. (2002). *Dasar- dasar Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muid, A. (2015). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus di Kab. Gresik Tahun 1994-2013). *Jurnal Ilmiah*, 3(2).
- Nondra, D., & dkk. (2013). Analisis Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba Badan Usaha Milik Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Fakultas Ekonomi*, 2(3).
- Ramadhon, A. S. (2014). Tingkat Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang, Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah*.
- Ruswandi, R. R. (2009). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sumedang[skripsi].
- Susilowati, E., & Rahmadewi, D. E. (2018). Encouraging a Regional Autonomy in Indonesia: An Analysis of Factor Affecting the Own Source Revenue of Central Java Province. *4th International Research Conference on Higher Education*, 423-430.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2004). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Kedelapan*. Jakarta: Erlangga.

Yahya, I. d. (t.thn.). Factor Affecting the Growth of Regional Revenue in the Distric/City of North Sumatera. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, 81.